

Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemberdayaan Pelaku Industri Batik Gambir di Kecamatan Harau

Almuhadara Dwi Ananda*, Fitri Eriyanti

Universitas Negeri Padang

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.133>

*Correspondence: Almuhadara Dwi Ananda

Email: adananda41@gmail.com

Received: 12-06-2024

Accepted: 15-07-2024

Published: 01-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gambir yang menjadi komoditas unggulan di daerah ini dan menjadi sumber penghidupan banyak petani. Namun, fluktuasi harga gambir di pasaran mendorong diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai jual gambir. Salah satu inovasi adalah kain batik dengan pewarna alami dari gambir, yang berpotensi meningkatkan nilai jual gambir. Oleh karena itu, pemberdayaan pengrajin batik gambir sangat penting untuk perkembangan industri ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memberdayakan pengrajin batik gambir di Kecamatan Harau. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah berperan cukup baik, masih ada kekurangan dalam pelatihan, pembinaan pemasaran, peningkatan keterampilan pengrajin, dan manajemen pembukuan. Selain itu, bantuan peralatan industri modern dan informasi akses pembiayaan juga belum sepenuhnya tersedia.

Kata Kunci : peran pemerintah, pemberdayaan, industri batik gambir

Abstract : This research is motivated by the fact that gambir has become a leading commodity in this area and a source of livelihood for many farmers. However, price fluctuations in the market have driven product diversification to increase the value of gambir. One innovation is batik fabric dyed with natural gambir dye, which has the potential to enhance the market value of gambir. Therefore, empowering gambir batik artisans is crucial for the development of this industry. This study aims to analyze the role of the Department of Industry and Labor of Lima Puluh Kota Regency in empowering gambir batik artisans in Harau District. The research employs a descriptive qualitative method, gathering data through interviews, observations, and documentation. The results indicate that although the Department of Industry and Labor has played a fairly good role, there are still deficiencies in training, marketing guidance, skill enhancement for artisans, and bookkeeping management. Additionally, support in the form of modern industrial equipment and information on financing access has not yet been fully provided.

Keywords : the role of the government, empowerment, gambir batik industry

Pendahuluan

Gambir adalah salah satu produk lokal yang sangat diminati di luar negeri yang pemerintah terus mendorong eksportnya. Menurut (ekon.go.id), Indonesia menyediakan 80% gambir global. Sumatera Barat dapat menyediakan 80–90% dari produksi gambir nasional. Banyak petani Sumatera Barat bergantung pada budidaya gambir, yang membuatnya menjadi salah satu produk andalan di wilayah tersebut. Kabupaten Lima Puluh Kota memproduksi 90% gambir Sumatera Barat.

Tabel 1. 1 Luas Lahan dan Produksi Gambir Berdasarkan Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 s/d 2022

No	Kota	Luas Lahan (Ha)			Produksi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kab. Lima Puluh Kota	16.574,00	17.548,00	17.536,00	6.802,00	7.846,00	7.846,00
2	Kab. Pesisir Selatan	9.963,00	9.992,00	10.332,00	451,00	5.875,00	5.875,00
3	Kab. Agam	986,00	523,00	515,00	197,00	123,00	40,00
4	Kab. Pasaman	389,00	377,00	397,00	35,00	88,00	88,00
5	Kota Padang	52,00	48,00	48,00	17,00	38,00	38,00
6	Kab. Pasaman Barat	27,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
7	Kab Padang Pariaman	23,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
8	Kota Solok	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		28.016,00	28.487,00	28.837,00	7.582,00	13.970,00	13.887,00

Sumber : Badan Pusat Statistic (2023)

Menurut (indonesia.go.id), harga gambir setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Penurunan paling tajam terjadi antara Februari 2020 dan awal Mei 2020, ketika harga gambir merosot menjadi hanya Rp19.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Ditambah lagi sistem "ijon" membuat petani lebih bergantung pada dukungan, yang dapat memperburuk kondisi mereka. Menurut Latifa (2022), sistem ijon adalah suatu bentuk perjanjian jual beli di mana status barang belum jelas, karena transaksi dilakukan sebelum barang yang dijual memiliki kepastian mengenai ukuran, berat, atau penampilannya. Secara sederhana, sistem jual-beli ijon dapat diartikan sebagai membeli barang pada saat sekarang dengan mengambil hasil dimasa mendatang.

Berbagai pihak terus melakukan diversifikasi gambir untuk meningkatkan nilai jualnya. Mengutip (indonesia.go.id), Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Kota Padang melakukan upaya untuk meningkatkan variasi. Sejak tahun 2005, Baristand Industri Padang telah menyelidiki penggunaan limbah gambir sebagai bahan pewarna. Pada tahun 2017, Balai Diklat Industri Padang memulai kerjasamanya dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota menjalankan program Diklat 3 in 1 Pembuatan Batik Tulis. Program ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan

budaya, tetapi juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Untuk menjamin ketahanan ekonomi mereka, masyarakat harus berusaha lebih keras daripada hanya mengandalkan transaksi getah gambir. Mereka harus berusaha untuk menambah nilai dari tanaman gambir. Selain itu, dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, terutama di Nagari Sarilamak. Untuk mengoptimalkan pemberdayaan pelaku industri batik gambir, diperlukan dukungan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 yang mengatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi dinas tersebut. Meskipun sudah ada upaya pemberdayaan, pelaksanaannya oleh dinas masih dianggap belum sepenuhnya efektif.

Pertama, pelaksanaan pelatihan keterampilan membuat batik belum rutin dilaksanakan, terhitung baru dua kali di selenggarakan yaitu pada tahun 2019 sebelum industri ini terbentuk, kemudian tahun 2022 setelah pandemi covid-19. Sepanjang tahun 2023 belum dilaksanakan pelatihan kepada Industri Batik Gambir dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua, bimbingan teknis dalam bentuk pemberian pendamping keahlian di lapangan untuk membantu dalam peningkatan proses produksi, penggunaan teknologi baru, dan perbaikan efisiensi industri batik gambir ini tidak ada dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga, pemberian bantuan peralatan atau mesin industri modern dan perbaikan infrastruktur yang mendukung produksi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk dalam industri batik gambir belum dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Keempat, terkait akses pembiayaan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja seharusnya memberikan informasi terkait permodalan kepada industri batik melalui berbagai cara, seperti seminar, workshop, atau publikasi online. Pada prakteknya, dinas menyerahkan urusan permodalan kepada pelaku industri batik gambir. Kelima, apabila dilihat dari promosi dan pemasaran secara online, pelaku industri batik gambir masih kaku dalam menggunakan sosial media dalam pemasaran mereka. Diperlukan pendamping keahlian untuk memberikan panduan pembinaan terkait pemasaran melalui sosial media agar pemasaran mereka menjadi lebih efektif menjangkau konsumen lebih banyak. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota memerlukan pelatihan yang memadai dan menyeluruh untuk meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktifitas. Ini akan berdampak pada peningkatan kualitas produk dan membuka peluang pasar.

Peran merujuk pada tingkat tanggung jawab dan harapan yang diemban oleh seseorang dalam posisi tertentu di masyarakat. (Team Penyusunan Kamus Besar, 2007:845) "Peran merupakan elemen penting dari tanggung jawab utama yang harus dijalankan". Menurut Ahmadi, (1982:52), peran merupakan sekumpulan ekspektasi sosial mengenai

bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan bersikap dalam konteks tertentu, yang ditentukan oleh status dan fungsi sosialnya. Dalam sosiologi, peran adalah gabungan dari berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Istilah "peran" mengacu pada tokoh tertentu yang mengambil tindakan tertentu. Dalam konteks ini, peran seorang aktor dan posisi masyarakat berada dalam kedudukan yang setara. (Sarwono W & Meinarno A, 2015). Menurut Soekanto (2010:243), peran adalah aspek yang dinamis dari sebuah status, dan seseorang melaksanakan perannya ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Menurut Riyadi (2002:138), peran dapat dipahami sebagai cara seseorang atau entitas memahami dan mengorientasikan diri dalam konteks sosial tertentu. Baik individu maupun organisasi akan bertindak sejalan dengan ekspektasi orang lain atau lingkungan mereka, sesuai dengan peran yang mereka jalankan.

Konsep pemberdayaan dalam Eriyanti & Darmairal (2023:27-28) ada tiga istilah yang harus dipahami dalam konsep pemberdayaan (Kartasisma, 1996:55; Ife, 1997:56 ; Suhendra, 2006:76) yaitu :

- Keberdayaan, keberdayaan dalam konteks masyarakat merujuk pada kapabilitas seseorang untuk berintegrasi dalam komunitas mereka serta pengembangan keberdayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang anggotanya menjaga kondisi fisik dan mental yang baik, serta pendidikan yang kuat dan inovatif, jelas menunjukkan tingkat keberdayaan yang tinggi. Selain aspek fisik, nilai-nilai dasar seperti rasa kekeluargaan, gotong royong, dan semangat juang juga penting sebagai sumber keberdayaan. Dengan demikian, keberdayaan masyarakat adalah elemen yang memfasilitasi mereka untuk terus bertahan dan terus berkembang. Masyarakat dengan tingkat keberdayaan yang tinggi akan lebih dinamis dan mampu melakukan pengembangan diri untuk mencapai kemajuan, serta berkontribusi terhadap ketahanan nasional.
- Memberdayakan, berarti menjalankan proses yang memungkinkan dan memandirikan masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat mereka sehingga mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.
- Pemberdayaan, meliputi usaha untuk mengembangkan kemampuan dan potensi komunitas, memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan identitas, harga diri dan kehormatannya secara optimal. Ini bertujuan agar masyarakat bisa bertahan dan tumbuh secara mandiri dalam sektor ekonomi, sosial budaya, dan politik

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data, peneliti menerapkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam

penelitian ini berjumlah enam orang. Keabsahan data diperiksa melalui metode triangulasi. Proses menganalisis data dengan pendekatan analisis yang bersifat interaktif, mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion*).

Hasil dan Pembahasan

Selain melaksanakan tugas utamanya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga aktif menjalankan serangkaian kegiatan yang mendukung misi mereka. Misi tersebut meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia yang berwawasan budaya dan kompetitif serta dorongan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui berbagai inisiatif pemberdayaan, diharapkan pelaku industri batik gambir dapat meningkatkan produksi batik gambir dan, pada akhirnya, memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Analisis mengenai peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pemberdayaan pelaku industri batik gambir di Kecamatan Harau sesuai dengan teori yang diuraikan oleh Ife & Tesoriero (2014:251). Peran ini dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu a) Peran Fasilitatif (*facilitative roles*), b) Peran Edukatif (*educational roles*), c) Peran Perwakilan (*representational roles*), d) Peran Teknis (*technical_roles*).

1. Peran Fasilitatif (*facilitative roles*)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam memfasilitasi dan mempermudah perizinan usaha serta sertifikasi produk untuk industri batik gambir. Menurut Chuzaibi (2011:153), Perlindungan hukum ini memungkinkan pemilik hak paten untuk menuntut pelanggaran atas paten mereka. Jika paten terdaftar dengan sah, pemilik dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran. Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, dinas ini juga menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan baik dari internal maupun dengan menghadirkan ahli dari luar. Pelatihan dan pembinaan rutin berdampak positif pada peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Kaswan (2016:2) menyatakan sasaran dari pelatihan dan pengembangan adalah untuk meningkatkan kinerja. Rowley (2012:88) menambahkan bahwa pelatihan merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia yang mampu mempengaruhi bisnis secara signifikan. Meningkatkan intensitas pelatihan dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan pelaku industri. Namun, peran fasilitasi ini tidak berhenti pada pelatihan saja; sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan. Saat ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota belum dapat memberikan bantuan peralatan industri modern karena kendala dana. Penggunaan peralatan

industri modern dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta menurunkan biaya produksi yang tinggi. Cahyono et al., (2019:22) menunjukkan bahwa teknologi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Sani et al., (2020:151) menambahkan bahwa teknologi sangat membantu dalam efektivitas waktu, percepatan produksi, dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, secara keseluruhan, peran fasilitasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal. Pelatihan dan pembinaan belum dilaksanakan secara rutin setiap tahun, yang tentunya mempengaruhi kemampuan pengrajin batik gambir. Selain itu, bantuan peralatan industri yang belum disalurkan juga menjadi kendala dalam mendukung pengembangan industri batik gambir di Kecamatan Harau.

2. Peran Mengedukasi (*educational roles*)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi besar dalam pengembangan batik gambir, yang juga berfungsi sebagai langkah strategis untuk memperbaiki keterampilan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan pelaku industri batik gambir. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota telah menjalin kerjasama dengan Balai Diklat Industri Padang menggarisbawahi bahwa edukasi dan pelatihan memiliki peran vital dalam meningkatkan kompetensi pelaku industri. Edukasi yang baik dapat memperkuat keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan, memungkinkan pelaku industri untuk berkembang dengan lebih cepat dan inovatif. Sudibyo (2007:112) juga menekankan bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam pengembangan inovasi dan kreativitas pelaku industri. Dengan edukasi yang tepat, pelaku industri dapat menciptakan produk-produk baru yang lebih kreatif dan memiliki nilai tambah yang lebih besar, serta mengasah keterampilan mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan pasar dan teknologi. Oleh karena itu, peran edukasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan dengan baik dan optimal, termasuk melalui kerjasama dengan Balai Diklat Industri Padang untuk memastikan sosialisasi dan pelatihan yang menyeluruh.

3. Peran Perwakilan (*representational roles*)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota juga berfungsi sebagai perwakilan, melakukan interaksi dengan pihak eksternal demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, dinas berusaha menghubungkan pelaku industri batik gambir di Kecamatan Harau dengan konsumen dan pengrajin batik lain, terutama dari Jawa, melalui berbagai event promosi dan pameran yang mereka ikuti. Tambunan (2008:120) menjelaskan bahwa peran perwakilan sangat penting dalam memperkuat

jaringan dan akses pasar bagi pelaku industri, membantu mereka terhubung dengan pemasok, distributor, dan pelanggan potensial, serta memfasilitasi partisipasi dalam pameran dan forum bisnis internasional. Peran representatif juga mencakup penyampaian informasi mengenai permodalan kepada pelaku industri batik gambir di Kecamatan Harau. Namun, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum mencapai tingkat optimal dalam menyediakan informasi permodalan kepada pelaku industri batik gambir. Akibatnya, pelaku industri sering kali harus mengandalkan modal pribadi atau mengajukan pinjaman dari pihak luar. Budiman (2015:78) menekankan bahwa perwakilan industri memainkan peran krusial dalam memfasilitasi akses ke berbagai sumber pembiayaan, termasuk kredit dari lembaga keuangan tradisional dan investasi swasta. Eriyanti dan Darmairal (2023:57) juga mencatat bahwa keterbatasan modal dan akses pasar yang terbatas seringkali menjadi penyebab utama ketergantungan dan kemunduran dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran representatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kerjasama dengan pihak luar yang dapat menyediakan bantuan dana untuk mendukung pemberdayaan industri batik gambir di Kecamatan Harau, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku industri tersebut

4. Peran Teknis (*representational roles*)

Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota berperan dalam pengelolaan dan pengendalian finansial. Pelaku industri batik gambir belum melakukan pendataan yang memadai, sehingga dinas kesulitan menilai kinerja usaha mereka. Pendataan yang akurat akan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan program yang tepat. Ketidakmampuan pelaku usaha dalam pembukuan menghambat penilaian kinerja usaha mereka. Sailendra et al., (2020:27) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan sangat penting untuk membantu pelaku usaha mendapatkan akses ke pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha. Peran teknis juga mencakup pemanfaatan teknologi, khususnya media sosial, sebagai alat pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk dan memperluas pangsa pasar online. Namun, pelaku industri batik gambir masih kesulitan mengadopsi teknologi pemasaran digital. Selain pelatihan, mereka memerlukan pendampingan khusus dalam digital marketing agar lebih efektif. Amijaya et al., (2020:360) menyoroti perlunya mempertimbangkan kesiapan anggota kelompok, yang umumnya berusia 40 tahun ke atas dan merupakan ibu rumah tangga dengan aktivitas sampingan membatik. Oleh karena itu, pendampingan dari generasi muda sangat diperlukan untuk mengembangkan konten

digital secara bertahap. Program pendampingan ini bertujuan mendukung produk batik tulis warna alam agar dapat bersaing di pasar global. Secara keseluruhan, peran teknis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal karena masih kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam masalah manajerial dan pemasaran online. Padahal, pembinaan dan pendampingan yang intensif dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan menciptakan peluang untuk memasuki pasar yang lebih besar.

Faktor Pendukung

Motivasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam pemberdayaan pelaku industri batik gambir di Kecamatan Harau. Sukirman (2012:87) mengungkapkan bahwa semakin tinggi motivasi wirausahawan, semakin besar kemungkinan mereka untuk sukses dalam usaha mereka. Motivasi berfungsi sebagai dorongan internal yang mendorong wirausahawan untuk bekerja dengan maksimal. Ferli et al., (2023:929) menambahkan bahwa meskipun baik mental wirausaha maupun motivasi berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha, motivasi memiliki dampak yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan usaha dibandingkan dengan mental wirausaha itu sendiri.

Selain itu, komunikasi yang efektif antara pelaku industri dan dinas juga merupakan faktor menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang sinergis di antara semua pihak terkait. Subekti (2018:45) juga menegaskan bahwa komunikasi yang baik dalam industri dapat memperkuat hubungan dengan konsumen, penyedia, dan pihak-pihak penting lainnya, yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan usaha.

Faktor Penghambat

1. Anggaran terbatas

Sumber daya keuangan yang memadai memungkinkan dinas untuk melaksanakan program pemberdayaan industri dengan lebih optimal dan efisien. Suparno (2019:120) menjelaskan bahwa tanpa dukungan finansial yang cukup, dinas akan kesulitan menerapkan program-program strategis yang esensial bagi perkembangan dan daya saing pelaku industry.

2. Daya beli rendah

Harga memegang peranan penting dalam menentukan permintaan atau daya beli masyarakat. Menurut Chita Oktapriana et al., (2021:267), tingginya biaya produksi berdampak pada harga jual yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mengurangi minat

beli, terutama kalangan kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah.

3. Desain kurang menarik

Desain memainkan peran krusial dalam pemasaran sebagai salah satu elemen yang membentuk daya tarik produk. Stanton (2005:104) menyebutkan bahwa desain produk merupakan kunci dalam membentuk citra produk. Desain yang inovatif dan menarik dapat memberikan kesan positif yang kuat pada konsumen, meningkatkan daya pikat produk tersebut.

Kesimpulan

Peran pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap pelaku industri batik gambir di Kecamatan Harau sudah menunjukkan hasil yang positif, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa area masih membutuhkan perhatian, seperti pelaksanaan pelatihan dan pembinaan dalam aspek pemasaran, peningkatan keterampilan pengrajin, dan manajemen pembukuan yang belum dilakukan secara rutin. Selain itu, dukungan berupa peralatan produksi yang dapat meningkatkan kualitas batik juga masih kurang. Dalam hal permodalan, informasi mengenai akses pembiayaan untuk pelaku industri batik gambir juga belum memadai, menyebabkan mereka kesulitan dalam memperoleh modal. Faktor-faktor pendukung pemberdayaan meliputi motivasi tinggi dari pelaku industri batik gambir dan adanya kerjasama yang solid antara dinas dan pelaku industri. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup kendala pendanaan untuk pelatihan dan promosi, harga batik gambir yang tinggi, daya beli masyarakat yang rendah, serta keterbatasan inovasi dalam hasil kreasi batik. Untuk mengatasi hal ini, peneliti menyarankan agar pembinaan dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dengan evaluasi dan umpan balik rutin untuk meningkatkan kualitas batik gambir. Selain itu, disarankan agar dinas menyediakan peralatan industri modern dan memberikan informasi tentang akses pembiayaan untuk mendukung perkembangan pelaku industri batik gambir.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. (1982). *Sosiologi Pendidikan: membahas gejala pendidikan dalam konteks struktur sosial masyarakat*. PT Bina Ilmu.
- Amijaya, S. Y., Seliari, T., & Oentoro, K. (2020). PENGEMBANGAN STRATEGI PEMASARAN DAN PROMOSI PRODUK UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- BPS. (2023). *Luas Lahan dan Produksi Gambir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

- <https://sumbar.bps.go.id/indicator/54/597/1/luas-lahan-dan-produksi-gambir-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>
- Budiman, A. (2015). *Strategi Pengembangan UMKM di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyono, M. S., Harahap, D. H., & Sukrajap, M. A. (2019). Penerapan Teknologi Produksi Makanan Olahan untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandung. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v3i1.567>
- Eriyanti, F. & D. R. (2023). *Administrasi Negara dan Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). RAJAWALI PERS.
- Fata'al, A. C. (2011). Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM. *Jurnal Syiar Hukum*, XIII(15), 152–167.
- Ferli, O. (2023). Pengaruh Mental dan Motivasi Wirusaha Terhadap Perkembangan UMKM pada Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera, Bojongsari, Depok. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 03(03), 929. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/842%0Ahttps://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/download/842/1032>
- Ife, J. (2014). *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Kartasisma, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat : memadukan pertumbuhan dan pemerataan / Ginandjar Kartasasmita* (p. 113). Jkarta Cides.
- Kaswan. (2016). *Pelatihan dan Pengalaman untuk Meningkatkan Kinerja SDM*. Alfabeta.
- Latifa, N. (2022). Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(1).
- Oktapriana, C., Nurdiniah, D., Bhuana, K. W., & Novianti, N. (2021). PENDAMPINGAN PERHITUNGAN HARGA JUAL MELALUI METODE SERVICE LEARNING BAGI KEDAI KOPI DI KOTA BEKASI. *LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 265. <https://doi.org/10.25077/logista.5.2.265-274.2021>
- Riyadi, D. S. (2002). *Pengembangan Wilayah Teori Dan Konsep Dasar Dalam Pengembangan Wilayah Dan Otonomi Daerah Kajian Konsep Dan Pengembangan. P2KTPW-BPPT: Jakarta*.
- Rowley, C. (2012). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Raja Grafindo Persada.

- Sailendra, S., Suratno, S., & Tampubolon, M. (2020). Tatakelola Keuangan dan Akses Permodalan UMKM Terhadap Perbankan dalam Meningkatkan dan Pengembangan Nilai Ekonomi Usaha: UMKM Pujasera Cempaka Putih Jakarta Pusat. *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 24–34. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.v1i01.1456>
- Sani, A., Wiliani, N., Budiyantera, A., & Nawaningtyas, N. (2020). PENGEMBANGAN MODEL ADOPTI TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI DIANTARA UMKM. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*, 5(2), 151–158. <https://doi.org/10.33480/jitk.v5i2.1055>
- Sarwono W, S., & Meinarno A, E. (2015). *Psikologi Sosial*. Salemba Humanika.
- Setiawan, A. (2020). *Gambir Indonesia Unggul di Pasar Dunia*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/kuliner/1855/gambir-indonesia-unggul-di-pasar-dunia?lang=1>
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*. RAJAWALI PERS.
- Subekti, R. (2018). *Komunikasi Bisnis untuk UMKM*. Penerbit Andi.
- Sudibyo, B. (2007). *Inovasi dan Kreativitas dalam Pengembangan IKM*. Universitas Indonesia.
- Suhendra, K. (2006). *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Bandung*. Alfabeta.
- Sukirman. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Karyawan terhadap Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil Jenang Kudus di Kabupaten Kudus. Salatiga. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 2(1), 36.
- Sumbar, P. (2021). *Komoditas Gambir Indonesia Unggul di Mancanegara*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3116/komoditas-gambir-indonesia-unggul-di-mancanegara>
- Suparno, J. (2019). *Manajemen Pengembangan UKM di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Tambunan, T. (2008). Development of SME in ASEAN with Reference to Indonesia and Thailand 53. In *Chulalongkorn Journal of Economics* (Vol. 20, Issue 1).
- Team Penyusunan Kamus Besar. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia.